

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual

1. Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas

a. Definisi Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup.¹⁴

Pelestarian alam dan lingkungan hidup ini tak terlepas dari peran manusia, sebagai khalifah di muka bumi, sebagaimana yang disebut dalam QS Al-Baqarah yaitu :

مَنْ فِيهَا أَتَجَعَلُ قَالَوَا حَلِيفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٌ إِيَّيَ لِلْمَلَائِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
أَعْلَمُ إِيَّيَ قَالَ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنُحْنُ الدِّمَاءَ وَيَسْفِكُ فِيهَا يُفْسِدُ
تَعْلَمُونَ لَا مَا

Artinya : Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." (Q.S. Al-Baqarah : 30)

¹⁴ <http://kambing.ui.ac.id/bebas/v12/sponsor/Sponsor-Pendamping/> 10-juli-2010 07,30 wib

Arti khalifah di sini adalah: “seseorang yang diberi kedudukan oleh Allah untuk mengelola suatu wilayah, ia berkewajiban untuk menciptakan suatu masyarakat yang hubungannya dengan Allah baik, kehidupan masyarakatnya harmonis, dan agama, akal dan budayanya terpelihara.¹⁵

Pelaksanaannya dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing, masyarakat, serta pelaku pembangunan lainnya dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup. Sektor lingkungan hidup oleh para perencana dan pelaku pembangunan masih kurang diperhatikan dibandingkan bidang ekonomi misalnya. Hal ini sesungguhnya mempengaruhi tujuan pembangunan berkelanjutan.

Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan mengemban tugas yang cukup berat dalam pembangunan termasuk pembangunan lingkungan hidup. Terlebih lagi dengan adanya otonomi daerah. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pencemaran air dan keterkaitan konsumsi.¹⁶

Pengelolaan lingkungan hidup yang diartikan sebagai adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang

¹⁵ Dr. M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Penerbit Mizan, Cetakan 13, 1996) hal. 96

¹⁶ Tim Penyusunan PPLHD Kantor Menteri Negara LH, 1999, *Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah*. Di <http://www.scribd.com/> 13-Juli-2010 jam 18-30

mencakup kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup, ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya.
2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.
4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.

Ketersediaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan tersedianya cukup ruang untuk hidup pada tingkat kestabilan sosial tertentu, disebut *daya dukung lingkungan*. Singkatnya, daya dukung lingkungan ialah kemampuan lingkungan untuk mendukung perikehidupan semua makhluk hidup.

Di bumi ini, penyebaran sumber daya alam tidak merata letaknya. Ada bagian-bagian bumi yang sangat kaya akan mineral, ada pula yang tidak. Ada yang baik untuk pertanian ada pula yang tidak. Oleh karena itu, agar pemanfaatannya dapat berkesinambungan, maka tindakan eksploitasi sumber daya alam harus disertai dengan tindakan perlindungan. Pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan cara yang rasional antara lain sebagai berikut :

1. Memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan hati-hati dan efisien, misalnya: air, tanah, dan udara.

2. Menggunakan bahan pengganti, misalnya hasil metalurgi (campuran).
3. Mengembangkan metoda menambang dan memproses yang efisien, serta pendaurulangan (recycling).
4. Melaksanakan etika lingkungan berdasarkan falsafah hidup secara damai dengan alam.

b. Berbasis Komunitas

Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama. Dalam komunitas manusia, individu-individu di dalamnya dapat memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa. Komunitas berasal dari bahasa latin *communitas* yang berarti "kesamaan", kemudian dapat diturunkan dari *communis* yang berarti "sama, publik, dibagi oleh semua atau banyak orang."¹⁷

Nama komunitas harus dapat memberikan keterangan mengenai sifat-sifat komunitas tersebut. Cara yang paling sederhana, memberi nama itu dengan menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan bagaimana wujud komunitas seperti padang rumput, padang pasir, hutan jati, dll.¹⁸

Cara yang paling baik untuk menamakan komunitas itu adalah dengan mengambil beberapa sifat yang jelas dan mantap, baik hidup

¹⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas> 14-Juli-2010 jam 22.00

¹⁸ Irwan, Djamal Zoer'aini, 2003, Prinsip-prinsip Ekologi dan Organisasi. Hal 45 -46

maupun tidak. Ringkasannya pemberian nama komunitas dapat berdasarkan :

1. Bentuk atau struktur utama seperti jenis dominan, bentuk hidup atau indikator lainnya seperti hutan pinus, hutan agathis, hutan jati, atau hutan Dipterocarpaceae, dapat juga berdasarkan sifat tumbuhan dominan seperti hutan sklerofil
2. Berdasarkan habitat fisik dari komunitas, seperti komunitas hampan lumpur, komunitas pantai pasir, komunitas lautan,dll
3. Berdasarkan sifat-sifat atau tanda-tanda fungsional misalnya tipe metabolisme komunitas. Berdasarkan sifat lingkungan alam seperti iklim, misalnya terdapat di daerah tropik dengan curah hujan yang terbagi rata sepanjang tahun, maka disebut hutan hujan tropik.¹⁹

Berbasis pada komunitas (*community based*) adalah suatu strategi yang mendasarkan kepada suatu keyakinan bahwa masyarakat mampu melakukan tindakan-tindakan untuk merubah kondisi sosial yang ada. Strategi berbasis komunitas ini menganut prinsip-prinsip antara lain: berpihak kepada komunitas yang paling lemah, transparansi, kerja sama (kolaborasi) antar semua pihak, dialogis, dan pembagian peran yang setara.

Untuk menjalankan strategi berbasis pada komunitas, langkah-langkah yang dianjurkan untuk dijalankan sebagai berikut:²⁰

¹⁹ Ekologi Komunitas dan Lingkungan, Jakarta: Bumi Aksara 2003. hal. 14

²⁰<http://www.law.ualberta.ca/centres/hli/userfiles/> 29 Juli 2010 Jam 09.30

1. *Membangun kelompok masyarakat.*

Ada beberapa alasan, mengapa harus membangun kelompok masyarakat. *pertama*, program ini berjangka panjang. *Kedua*, program ini berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. *Ketiga*, program perlu dijaga agar tetap bermutu dan sesuai kebutuhan masyarakat. *Keempat*, perlu pengaturan terhadap sumberdaya masyarakat. *Kelima*, masyarakat di tempatkan sebagai pelaksana program.

Kelompok masyarakat (community based organisation – CBO) ini bertugas sebagai pelaksana program rehabilitasi dan rekontruksi tingkat desa. Dalam membentuk kelompok masyarakat perlu diperhatikan komposisi keterwakilan elemen masyarakat. Hal ini diperlukan sebagai upaya menghindari terjadinya dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat.

Untuk meningkatkan kapasitas kelompok (CBO), perlu diadakan training-training khusus dan assistensi.

2. *Perencanaan program yang didasarkan kepada kebutuhan masyarakat*

Meskipun sudah dilakukan participatory assesment, perencanaan program sebaiknya ditawarkan kembali kepada masyarakat. Yang perlu diingat, masyarakat tidak berada di dalam ruang kosong dan dalam posisi stagnan. Masyarakat selalu berada dalam situasi dinamis dan dalam pengaruh berbagai pihak.

Bisa jadi, saat laporan ini disusun sudah ada lembaga lain yang masuk ke desa Gunung Anyar Tengah dan membuat sebuah kegiatan yang sama. Maka tidak ada salahkan mendiskusikan

kembali perencanaan bersama masyarakat. Dengan demikian, masyarakat merasakan bahwa perencanaan tersebut merupakan perencanaan mereka.

3. *Kendali pelaksanaan diserahkan pada masyarakat*

Dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat harus diberi porsi lebih besar. Pemberian peran kepada masyarakat tidak sama dengan menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat. Tetapi perlu diatur peran dan tugas masing-masing pihak dalam menjalankan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pembagian peran dan tugas harus disusun seadil mungkin. Sehingga memungkinkan masyarakat mendapatkan pembelajaran berdemokrasi, berorganisasi dan membangun kerja sama (kolaborasi) dengan baik.

4. *Refleksi*

Refleksi merupakan kunci dalam menemukan inti pembelajaran. Maka di dalam strategi community based, refleksi memegang peran kunci di dalam pelaksanaan program.²¹

Refleksi yang baik adalah proses mempertanyakan kembali langkah-langkah atau kegiatan yang sudah dilakukan. Proses ini harus dijalankan dengan dialogis. Proses dialogis hanya bisa

²¹<http://qsw.sagepub.com/cgi/content/short/> 30 Juli 2010 Jam 11.10

dijalankan jika antar berbagai pihak tidak saling mendominasi dan tidak mencari menang (keuntungan) sendiri.

c. Masyarakat Industri

Masyarakat adalah sebuah organisme sesuatu yang hidup. Sebagai organisme, masyarakat mengalami pertumbuhan terus menerus, sehingga bagian-bagiannya tidak sama. Masyarakat menunjukkan peningkatan struktur. Peningkatan kompleksitas struktur berarti dalam struktur masyarakat terjadi diferensiasi, atau berarti pula bahwa dalam masyarakat terjadi peningkatan diferensiasi fungsi-fungsi. Setiap bagian yang memiliki fungsi yang berbeda, sesungguhnya tetap harus berfungsi bersama-sama untuk kehidupan keseluruhan. Antara bagian yang satu dengan lainnya saling tergantung atau saling membutuhkan.

Masyarakat industri adalah masyarakat yang ciri kehidupannya cepat berubah dan mudah terpengaruh, karena lokasinya yang berada di dekat kota industri, sehingga arus informasi dan pengaruh-pengaruh dari kota cepat sampai kepada masyarakat pinggiran. Masyarakat pinggiran juga mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap segi pedagogis daripada saling mempengaruhi dan saling mempererat hubungan untuk menuju kesejateraan dan kemajuan dalam masalah apa pun, terutama untuk mempengaruhi dalam pendidikan sebagai hal

yang pokok untuk memupuk perasaan sosial dan kecakapan untuk menyesuaikan diri dalam masyarakat.²²

Begitu pula yang terjadi pada masyarakat Kelurahan Gunung Anyar Tengah, pada masyarakat ini juga cenderung individualis karena mereka selalu dikejar waktu dan tidak ada waktu untuk saling komunikasi antara masyarakat yang lain, maka sangat tepat sekali apabila masyarakat industri dicirikan sebagaimana berikut, antara lain:

- Perputaran waktu yang dikendalikan oleh pihak pabrik sehingga masyarakat industri harus bisa mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.
- Peralihan dari pekerjaan sektor pertanian kepada pekerjaan di sektor pabrik.
- Jumlah penduduk Kota yang *melek* huruf seiring kebutuhan bidang pekerjaan yang lebih kompleks.

Dalam masyarakat industri biasanya terdapat spesialisasi pekerjaan. Terbentuknya spesialisasi pekerjaan tersebut disebabkan oleh semakin kompleks dan rumitnya bidang-bidang pekerjaan dalam masyarakat industri. Proses perubahan yang terjadi dalam diferensiasi pekerjaan ini mengakibatkan terjadinya hierarki prestise dan penghasilan yang kemudian menimbulkan adanya stratifikasi dalam masyarakat yang biasanya berbentuk piramida. Stratifikasi sosial inilah

²² Lauer, Robert H. 2003. Perspektif Tentang Perubahan Sosial. (Terjemahan Alimandan). Jakarta : Rineka Cipta, hal 23

yang menentukan strata anggota masyarakat yang ditentukan berdasarkan sikap dan karakteristik masing-masing anggota kelompok.²³

Distribusi terjadi karena dalam masyarakat terdapat barang-barang yang bernilai atau berharga namun jumlahnya langka dan harus dialokasikan kepada anggota-anggota masyarakat. Model dari proses distribusi dalam masyarakat, terutama masyarakat industri adalah stratifikasi sosial.

Sifat alam masyarakat pada tradisi konservatif seringkali dibandingkan dengan organisme biologis. Sebagaimana halnya organisme sebagai suatu sistem keberlangsungan hidup dan keberadaannya tercapai melalui pembagian kerja sama dari bagian-bagian yang kecil. Untuk itu teori konservatif modern memberi nama “sistem sosial”

Dalam melihat masyarakat manusia, terdapat perbedaan pandangan yaitu antara teori fungsional, teori konflik dan teori radikal. Teori fungsional memposisikan karakter sistemik dari masyarakat manusia dan kemudian menjelaskan tindakan pada bagian-bagian dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan dan pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Sebaliknya teori konflik berkarakter antisistemik. Teori ini menekankan bahwa konflik dan perjuangan secara konstan mengancam struktur masyarakat. Sedangkan teori

²³ <http://massofa.wordpress.com/2008/04/05/individu-dan-masyarakat-industri/> 13 Juli 2010 (11.03 WIB)

radikal cenderung memandang masyarakat manusia berada di tengah-tengah, di mana konflik kehidupan berlangsung.

Kepentingan individu berbeda dengan kepentingan masyarakat. Di mana kepentingan masing-masing individu berbeda-beda. Manusia tidak mempunyai tujuan yang sama. Meskipun ada kesamaan tujuan seringkali tidak ditempatkan pada tingkatan yang sama. Ini dikarenakan masing-masing individu secara tetap harus memilih di antara tujuan-tujuan yang mereka inginkan. Namun tujuan yang paling dasar dari individu adalah usaha mempertahankan status dan prestise, menciptakan kenyamanan, keselamatan di dunia dan akhirat.

Kepentingan masyarakat berbeda dengan kepentingan individu. Karena ketika menjadi anggota masyarakat kita diharuskan untuk mendefinisikan sebagai tujuan masyarakat bukan sebagai tujuan individu lagi. Dalam mendefinisikan tersebut tanpa melihat lagi atau memandang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bagi anggota-anggota individu bahkan sebagian mayoritas. Dan seringkali kelas yang dominan mempunyai pengaruh yang sangat besar, di mana mereka memiliki kekuatan untuk menentukan arah terkoordinasi dari masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan masyarakat adalah tujuan-tujuan dari kelas yang dominan tersebut.

Dalam banyak kasus di bidang lingkungan yang mencuat mengindikasikan bagaimana sesungguhnya terjadi perbedaan hitam-putih antara apa yang dituangkan dalam regulasi sebagai perwujudan

akan kepedulian Negara, rakyat yang dimanifestasikan dalam kelembagaan perwakilan serta lembaga yudisial sebagai garda terakhir dalam penegakan hukum. Muara dari kegagalan pemerintah dan lembaga peradilan dalam menangani persoalan lingkungan membawa akibat pada resistensi korban lingkungan misalnya: aksi demo dengan blokade jalan, merusak fasilitas industri baik atas dasar investasi domestik maupun asing, pembangkangan yang kesemuanya menggambarkan senjata terakhir dari kaum yang kalah.²⁴

2. Gerakan Kemasyarakatan

a. Kemasyarakatan

Gerakan kemasyarakatan didefinisikan sebagai perangkat keyakinan dan tindakan kolektif yang tak melembaga (*non institutionalized*) yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan atau menghalangi perubahan di dalam sebuah masyarakat.

Keyakinan-keyakinan dan tindakan-tindakan (prilaku) yang tidak melembaga (*non institutionalized*) mengandung arti bahwa mereka tidak diakui sebagai sesuatu yang berlaku dan diterima umum secara luas dan sah di dalam suatu masyarakat. Dari definisinya gerakan kemasyarakatan adalah sebuah proses perubahan atau (paling kurang, perubahan yang diupayakan).²⁵

Pertama, obyek analisis dalam studi tentang gerakan kemasyarakatan adalah pertama dan terutama individu. Penelitian perlu

²⁴ <http://manifestmaya.blogspot.com/2008/01/pengelolaan-lingkungan-hidup-berbasis>
16-Juli, 2010 pukul 20,45

²⁵ Robert Mirel, *Teori pergerakan sosial*, (Yogyakarta, Resist Book. 2004) h. 07

memusatkan perhatian pada persoalan mengapa dan bagaimana individu-individu menggabungkan diri dalam sebuah gerakan kemasyarakatan dan pada ciri-ciri khas yang membedakan individu-individu yang terlibat dalam sebuah gerakan dari mereka yang tidak terlibat. Kekuatan-kekuatan cultural menjadi riil dan dapat diteliti secara empiris tatkala mereka dialih bentukkan kedalam motivasi, predisposisi, dan kecenderungan pribadi. Konsep mengenai kepribadian merupakan cara yang bermanfaat dan sah guna memperlihatkan konsistensi didalam motivasi, perilaku, keyakinan, dan predisposisi individu. Konsistensi ini terus bertahan lintas waktu dan lintas peran-peran sosial.

Kedua, ideologi, yakni sistem kepercayaan didalam sebuah gerakan kemasyarakatan, bersifat skunder, dan lebih merupakan sebuah elemen yang terdeterminasi ketimbang elemen penentu. Keyakinan-keyakinan para individu dibentuk oleh kepribadian mereka, atau oleh tekanan-tekanan mikro informal didalam lingkungan hidup pribadi para individu studi mengenai keyakinan, dan bukanya ide-ide mengenai sistem kepercayaan sebagai sebuah sistem pemikiran yang abstrak.

Ketiga, fenomena perkumpulan massal (*mass society*)²⁶ merupakan sebuah konsep yang berguna untuk menghubungkan studi tentang tingkah laku individu dengan perubahan-perubahan sosial yang lebih besar. Yang dimaksudkan dengan perkumpulan massal adalah suatu keadaan di dalam masyarakat di mana para individu disingkirkan

²⁶ N. Kusuma (Penyunting) "*Gelombang Perlawanan Rakyat* (Yogyakarta: Insis Press, Tt), hal. 40

dari kelompok-kelompok sosial yang tetap dan membuatnya lebih rentan terhadap aksi-aksi protes atau pengaduan-pengaduan di dalam sebuah gerakan kemasyarakatan. Analisis mesti berfokus pada penelitian bagaimana kondisi-kondisi individu seperti aliensi dan kondisi-kondisi kultural seperti ketakberaturan berhubungan dengan lahirnya sebuah gerakan kemasyarakatan. Perkumpulan massal melahirkan gerakan-gerakan kemasyarakatan, yakni bahwa gerakan-gerakan ini dilihat sebagai jawaban terhadap hilangnya jangkar-jangkar nasional, karena para individu yang terlepas dari komunitasnya yang mapan mencari bentuk-bentuk komitmen bersama yang baru.

Gerakan kemasyarakatan adalah sebuah bentuk tindakan kolektif baik irasional maupun rasional didalam melakukan perubahan yang inovatif dalam masyarakat itu sendiri, dalam kerangka aksinya gerakan kemasyarakatan harus di dukung dari nilai pluralisasi, visi dan tujuan serta ada unsur budaya yang menjadi pegangan dalam mencari tujuan gerakan.

Gerakan kemasyarakatan dan tingkah laku kolektif mesti dipahami sebagai usaha kolektif untuk membangun sebuah orde sosial yang baru. Semua fenomena sosial mesti dimengerti sebagai tindakan-tindakan, yakni pembentukan-pembentukan dunia sosial yang berkelanjutan dan berproses. Tindakan-tindakan ini didasarkan pada komunikasi dan bentuk simbol-simbol. Melalui tindakan-tindakan dan interaksi-interaksi simbolis ini, individu-individu secara tetap

menegoisasikan kembali representasi simbolis yang mereka ciptakan bagi diri mereka sendiri dan bagi orang-orang lain.

Ada perbedaan antara gerakan-gerakan dan perilaku kolektif, antara tingkah laku yang terlembaga dan yang tak terlembaga, perilaku kolektif bersifat situasional dan spontan dan kurang terprogram dibawah kebiasaan atau aturan-aturan jika dibandingkan dengan tindakan - tindakan manusia lainnya.

Herbert Blumer, seperti dikutip oleh Robert Mirtel, berpendapat bahwa perilaku kolektif bukan sebagai perilaku patologis dan destruktif.²⁷

b. Tahap-Tahap Gerakan Kemasyarakatan

a. Penekanan pada aspek irasional

Pada era gerakan kemasyarakatan lebih disebabkan oleh faktor-faktor perilaku sosial yang muncul karena adanya dominasi budaya ataupun paham dalam masyarakat. Pelaku sosial lebih cenderung bertindak secara kolektif di dalam mempertahankan budaya maupun paham yang dianutnya ataupun memaksakan budaya atau paham tersebut kepada kelompok lain.

b. Penekanan pada aspek rasional

Pada era ini gerakan-gerakan kemasyarakatan diwarnai oleh tindakan-tindakan rasional, kelompok - kelompok akademik ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan, gerakan - gerakan

²⁷ Robert Mirtel, *Teori pergerakan sosial*, (Yogyakarta, Resist Book. 2004) h. 35

perjuangan hak sipil, gerakan - gerakan dekolonialisme maupun gerakan-gerakan kemerdekaan ini.

c. Gerakan-gerakan dekonstruksi.

Pada era gerakan kemasyarakatan masih bercorak pada pembongkaran paradigma masyarakat, tentang sebuah keamanan sistem. Gerakan dibidang ekonomi, sosial dan budaya lebih di tekankan pada redefinisi sistem.²⁸

Proses-proses gerakan mencakup kerangka waktu yang lebih panjang daripada yang disiapkan oleh banyak teoritis mobilisasi sumber daya untuk meneliti fenomena gerakan kemasyarakatan didalam riset-riset yang mereka lakukan,²⁹ dinamika gerakan kemasyarakatan bisa saja berlangsung berdekade -dekade dan malah beratus-ratus tahun dalam penampakan dirinya diatas pentas sejarah. Perhatian perlu juga diberikan kepada akibat-akibat yang terencana (*Unintended*) dan tak terantisipasi (*Unanticipated*) dari keberhasilan-keberhasilan yang dicapai oleh sebuah gerakan.

Penyatuan kerangka (*Frame alignment*) dan perubahan kerangka (*Frame transformation*) merupakan dua konsep yang mengacu pada sejauhmana sistem-sistem kepercayaan sebuah

²⁸ *Ibid.* h. 87

²⁹ Beccali Bianca "The Modern Women's Movement" in Italy, *New Left Review* 204

gerakan kemasyarakatan yang baru cocok atau malah menantang sistem-sistem kepercayaan yang sudah ada.³⁰

Penggunaan istilah mentalitas menunjuk pada keberhasilan mempertahankan bentuk-bentuk kultural dalam jangka waktu yang panjang. Mentalitas adalah kebiasaan-kebiasaan berfikir, yang ditularkan dari generasi ke generasi melalui semua praktek kehidupan sehari-hari atau dengan istilah (*Cultural framework*) “kerangka kerja budaya”³¹, mereka membentuk apa yang diyakini oleh anggota-anggota komunitas budaya sebagai “pikiran sehat” (*Common sense*)³².

Gerakan kemasyarakatan kerap kali hanya merupakan puncak yang terorganisir dan kelihatan dari sebuah gunung es alienasi, disafiliasi dan oposisi seperti yang terungkap dalam interksi, organisasi, kebiasaan, dan praktek-praktek serta bentuk-bentuk kultural lainnya.

B. Kajian Teoritik

Dalam penelitian ini, studi tentang Pengelolaan Lingkungan dalam kajian teoritisnya termasuk dalam Paradigma Fakta Sosial, paradigma fakta sosial adalah menjelaskan tentang fakta dan realitas yang terjadi di

³⁰ Snow, David, dan Robert Benfort *‘Ideology, Frame Resonance and Participan Mobilization’* dalam Mirsel Robert, Teori Pergerakan Sosial, (Yogyakarta, Resist Book. 2004), hal. 79

³¹ Gold Jack, 1991 *‘Ideology, Cultural Frameworks, and The Process of revolution’* Theory and Society. Hal 20

³² Tarrow, Sidney 1988, *‘Democracy and Disorder Protest and Politic’ In Italy 1965-1975 New York Oxford University press*

masyarakat, karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasainya, maka dalam masyarakat selalu ada dua golongan yang saling bertentangan.³³

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teorinya Twelvetrees dan teori Civic Engagemen

1. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Twelvetrees (1991)³⁴ membagi perspektif teoritis pengembangan masyarakat ke dalam dua bingkai, yakni pendekatan profesional. Pendekatan profesional menunjuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial. Sementara itu, berbijak pada teori struktural neo-Marxis, feminisme dan analisis anti-rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidakseimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Pendekatan profesional dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra tradisional, netral dan teknikal. Sedangkan pendekatan radikal dapat diberi label sebagai pendekatan yang bermatra transformasional.

³³ Gorge Ritzer, 1992, *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press hal. 30-31

³⁴ Edi Suharto, Ph.D. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2005). Hal.40

2. Teori Civic Engagemen

Sebagaimana peneliti menyoroti masalah yang dipilih. Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah sebagai berikut:

a. Partisipasi Masyarakat

Kata partisipasi sering dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pembangunan, pengambilan keputusan, kebijakan, pelayanan pemerintah. Sehingga partisipasi itu memiliki arti yang penting dalam kegiatan pembangunan, dimana pembangunan itu bertujuan

Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam:

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participation*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)
3. Kontak antara warga Negara dengan pemerintah (*citizen government contacting*)
4. Partisipasi warga negara langsung

b. Perencanaan

Pengertian perencanaan sangat beraneka ragam. Keanekaragaman pengertian dan definisi perencanaan dipengaruhi pandangan dari sudut-sudut pandang tertentu sesuai kepentingan yang diharapkan.

. Dilihat dari segi alat atau cara untuk mencapai tujuan, alasan dilakukannya perencanaan adalah:

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuantujuan pembangunan.
2. Dengan adanya perencanaan, maka dilakukan suatu perkiraan (*forecasting*) terhadap halhal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui.

3. Dengan perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih *berbagai* alternative tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi yang baik.
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas *memilih* urutan-urutan pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya usaha rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/evaluasi.³⁵

Civic Engagemen dapat di artikan sebagai perbedaan esensial diantara tiap-tiap kelompok etnik masyarakat dalam asosiasi formal dan informal

Ada empat pendekatan dalam teori ini:

1. Esensialisme: Anggapan bahwa konflik disebabkan oleh adanya permusuhan antara dua kelompok (etnik) yang berbeda. Teori ini menegaskan adanya perbedaan esensial diantara tiap-tiap kelompok etnik.

Biasanya penelitian yang menggunakan pendekatan ini cenderung mencari kekuatan intrinsik diri dan kelompok-kelompok yang berbeda.

2. Instrumentalisme: Pendekatan yang lebih melihat pada peranan elit dalam menggunakan identitas etnik untuk mendapat keuntungan-keuntungan politik dan ekonomi.

Pendekatan ini berusaha mencari aktor-aktor (elit) yang ada di balik terjadinya suatu konflik kekerasan. Konflik dengan demikian, dipandang sebagai produk dari konflik antar elit yang menggunakan identitas etnik untuk memobilisasi dukungan bagi kepentingannya.

³⁵<http://repository.usu.ac.id/bitstream/> 31 Juli 2010 Jam 16.00

3. **Konstruktivisme:** Anggapan bahwa modernitas telah merubah makna identitas dengan membawa massa ke dalam kerangka kesadaran yang lebih luas dan ekstra lokal. Hal ini membuat identitas dan komunitas menjadi lebih luas dan terinstitusional.
Sebagian peneliti menyebut bahwa konflik yang terjadi di beberapa negara berkembang merupakan akibat dari kolonialisme.
4. **Institusionalisme:** Anggapan bahwa konflik terjadi karena tidak ada lembaga atau intitusi-institusi yang bekerja secara baik untuk mengakomodasi segala bentuk kepentingan antar elit atau kelompok.

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menganggap penting terhadap penelitian yang terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap tema penelitian ini, karena dengan adanya hasil penelitian dahulu akan mempermudah peneliti dalam melakukan penilaian, minimal menjadi pedoman penelitian.

Maksud dari penelitian yang terdahulu adalah memuat tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain, dari penelitian yang berjudul "Pengelolaan Lingkungan Berbasis Komunitas" berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh kebanyakan peneliti terutama dalam hal metode yang digunakan dengan obyek yang diteliti.

Walaupun demikian, masih banyak perbedaan lain terutama terletak pada rumusan masalah, misalnya pada penelitian:

1. Zainal Arifin, Pembangunan dan Problem Sosial Perkotaan "Analisis Problem Kemiskinan Masyarakat Wonokromo Sebagai Dampak Pembangunan Kota Surabaya" Skripsi Tahun 2006 Fokus kajian Penelitian ini pada proses pembangunan yang berlangsung dalam masyarakat melalui perangkat hukum dengan menafikan eksistensi masyarakat serta problem yang ditimbulkan sebagai akibat kurangnya partisipasi masyarakat.
2. Ari Mukhrizal, Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lingkungan Hidup Pada Masyarakat Pinggiran Industri "Studi Tentang Pelaksanaan Program Badan Keswadayaan Masyarakat Kureksari Puspasari Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kureksari Kec. Waru. Kab. Sidoarjo" Skripsi tahun 2006. fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program-program LSM di Kureksari.
3. Latifah, 2005. "*Pengelolaan Lingkungan Pada Masyarakat Pinggiran Kali Brantas*" (Studi Tentang Pelaksanaan Program Badan Keswadayaan Masyarakat Buger Lor Dalam Pengelolaan Lingkungan di Desa Buger Lor Kecamatan Buger Kabupaten Jember) penelitian membahas pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan program Masyarakat di Buger Lor dalam menata lingkungan hidup.